



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Basilio Dias Araujo
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Luhut B. Pandjaitan
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

PIHAK KEDUA,

Luhut B. Pandjaitan

PIHAK PERTAMA,

Basilio Dias Araujo

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN
MARITIM DAN ENERGI

TARGET KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
Stakeholders Perspective				
SS.1	Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global	1	Tingkat Kedaulatan Maritim Indonesia	70%
		2	Persentase Inisiasi Indonesia yang Diusulkan dan/atau Diterima di Forum Internasional	70%
SS.2	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional	3	Indeks Ketahanan Energi	Tahan (6-7,99)
Customer Perspective				
SS.3	Meningkatnya Peran Aktif dalam Penerapan Hukum dan Perjanjian Maritim untuk Menjaga Kedaulatan Maritim	4	Persentase Penerapan dan Inisiasi Gagasan Indonesia Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim	65%
SS.4	Terwujudnya Keamanan dan Ketahanan Maritim Indonesia	5	Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim	65%
SS.5	Terwujudnya Kepastian Hukum Wilayah Indonesia dan Terjaganya Kepentingan Indonesia	6	Tingkat Kepastian Kewilayahan Indonesia	60%
SS.6	Terwujudnya Keselamatan Maritim Indonesia	7	Tingkat Keselamatan Maritim di Indonesia	60%
SS.7	Meningkatnya Ketahanan Energi	8	Tingkat Ketahanan Energi	Tahan (6-7,99)
Internal Business Process Perspective				
SS.8	Efektivitas Rancangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	9	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%
Learning and Growth Perspective				
SS.9	Tersedianya SDM yang Kompeten	10	Persentase SDM Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Sesuai Kompetensi	85%
SS.10	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif	11	Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan	70

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
			Energi	
		12	Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	80
SS.II	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel	13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	75

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim	Rp 2.370.000.000
2	Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim	Rp 2.450.000.000
3	Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Maritim	Rp 2.415.000.000
4	Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim	Rp 2.440.000.000
5	Koordinasi Energi	Rp 2.458.000.000
6	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	Rp 1.391.070.000
7	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Rp 2.200.000.000
JUMLAH ANGGARAN		Rp15.724.070.000

Jakarta, Januari 2022

Menteri Koordinator Bidang
Kemaritim dan Investasi RI

Luhut B. Pandjaitan

Deputi Bidang Koordinasi
Kedaulatan Maritim dan Energi

Basilio Dias Araujo

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA/OUTPUT KINERJA	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			I	II	III	IV
13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai IKPA				v

Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi


Basilio Dias Araujo 

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

RINCIAN DATA KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA/OUTPUT KINERJA	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			I	II	III	IV
Stakeholders Perspective						
1	Tingkat Kedaulatan Maritim Indonesia	Tingkat Kedaulatan Maritim Indonesia				v
2	Persentase Inisiasi Gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum Internasional	Inisiasi Gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum Internasional				v
3	Indeks Ketahanan Energi Nasional	Indeks Ketahanan Energi				v
Customer Perspective						
4	Persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim	Inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim				v
5	Tingkat keamanan dan ketahanan maritim	Tingkat keamanan dan ketahanan maritim				v
6	Tingkat kepastian kewilayahan Indonesia	Tingkat kepastian kewilayahan Indonesia				v
7	Tingkat keselamatan maritim di Indonesia.	Tingkat keselamatan maritim di Indonesia				v
8	Tingkat pengendalian ketahanan energi	Tingkat ketahanan energi				v
Internal Business Process Perspective						
9	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	1. Rancangan Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia				v
		2. Rancangan Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Kewaspadaan Maritim (Maritime Domain Awareness)			v	
		3. Rancangan Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Nasional Perlindungan				v

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA/OUTPUT KINERJA	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			I	II	III	IV
		Pelaut dan Awak Kapal Perikanan				
		4. Rancangan Kebijakan Pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia				v
		5. Rancangan Kebijakan Pengendalian Realignment Flight Information Region (FIR)		v		
		6. Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)				v
		7. Rancangan Kebijakan Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim				v
		8. Rancangan Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional				v
		9. Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Sambungan Jaringan Gas				v
		10. Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi				v
Learning & Growth Perspective						
10	Persentase SDM Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Sesuai Kompetensi	Persentase SDM Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Sesuai Kompetensi				v
11	Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai Evaluasi Internal SAKIP				v
12	Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai PMPRB				v